

**LAPORAN HASIL  
PENELITIAN FUNDAMENTAL**



**MODIFIKASI PENDEKATAN FRONTIER *DATA ENVELOPMENT*  
*ANALYSIS (DEA)* UNTUK MENILAI EFISIENSI  
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD) DALAM PROGRAM  
PENGEMBANGAN EKONOMI KAWASAN (PPEK)  
DI JAWA TIMUR**

**Ketua Peneliti:**  
**FAJAR SUPANTO, SE., M.Si**  
**Anggota Peneliti :**  
**Eko Yuni Prihantono, SE., ME**

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional  
sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Fundamental  
Nomor: 230/SP2H/PP/DP2M/II/2008

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG  
SEPTEMBER 2008**



**LAPORAN HASIL  
PENELITIAN FUNDAMENTAL**



**MODIFIKASI PENDEKATAN FRONTIER *DATA ENVELOPMENT*  
*ANALYSIS (DEA)* UNTUK MENILAI EFISIENSI  
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD) DALAM PROGRAM  
PENGEMBANGAN EKONOMI KAWASAN (PPEK)  
DI JAWA TIMUR**

**Ketua Peneliti:**

**FAJAR SUPANTO, SE., M.Si**

**Anggota Peneliti :**

**Eko Yuni Prihantono, SE., ME**

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional  
sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Fundamental  
Nomor: 230/SP2H/PP/DP2M/II/2008

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG  
SEPTEMBER 2008**



## HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN FUNDAMENTAL

Judul : Modifikasi Pendekatan Frontier Data Envelopment Analysis (DEA) Untuk Menilai Efisiensi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Dalam Program Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK) Di Jawa Timur

Ketua Peneliti

Data Pribadi

a. Nama Lengkap : Fajar Supanto, SE.,MSi.  
b. Jenis Kelamin : L  
c. NIP/Golongan : 651 - FE / 3d  
d. Srata/Jab. Fungsional : S2 / Lektor Kepala  
e. Jabatan Struktural : Sekretaris Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat  
f. Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Manajemen  
g. Bidang Ilmu : Sosial  
h. Alamat Kantor : Jl. Ters. Raya Dieng 62-64 Malang  
i. Telepon/Faks/E-mail : 0341-568395 psw 216 / 0341-564994 / haji\_fajar@yahoo.com  
j. Alamat Rumah : Puncak Buring Indah B6/54  
k. Telepon/Faks/E-mail : 0341-751519/myfajar@gmail.com

Mata Kuliah Yang Diampu dan Jumlah sks

a. Mata Kuliah I	: Pengantar Ekonomi Pembangunan	2	sks
b. Mata Kuliah II	: Sistem Perbankan	3	sks
c. Mata Kuliah III	: Sistem Informasi Manajemen	3	sks
d. Mata Kuliah IV	: Ekonomi Makro	3	sks

Penelitian Terakhir

a. Judul Penelitian I : Penyusunan Input-Output Daerah Kota Pasuruan  
b. Judul Penelitian II : Penyusunan Data & Informasi Sektor Ekonomi Informal di Kota Malang  
c. Judul Penelitian III : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Malang  
d. Judul Penelitian IV : Pengembangan Model Pengelolaan Keuangan Daerah di Jawa Timur

Lokasi Penelitian

: Jawa Timur

Jangka Waktu Penelitian

: 1 tahun

Pembiayaan

: Biaya diajukan ke Dikti

Biaya dari Instansi Lain

- Biaya Tahun ke-1

Rp. 25.508.489,00

Rp.

0,-

- Biaya Tahun ke-2

Rp.

Rp.

0,-

Rp. 25.508.489,00

Rp.

0,-



Drs. M. Burhan, MM  
NIP. 509 / FE



Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Harmono, M.Si.  
NIP. 571 / FE

Malang, 25 September 2008

Ketua Peneliti,

Fajar Supanto, SE.,MSi  
NIP. 651 / FE



## RINGKASAN

Program Pengembangan Ekonomi Kawasan merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan dan penanganan pengangguran yang ditekankan pada sektor riil berbasis potensi aktual kawasan. Pengembangan Ekonomi Kawasan menekankan pada upaya pendayagunaan sumber daya ekonomi yang berfokus pada keterkaitan dan kete gantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai dengan jasa pelayanan dan upaya-upaya inovasi pengembangannya dalam bentuk: upaya penggalian, sumber daya potensial, pengembangan industri, perdagangan, jasa serta investasi lainnya yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan masyarakat miskin.

Penelitian ini berusaha menetapkan variabel input dan output untuk menilai efisiensi pada instansi BKAD yang merupakan lembaga yang dibentuk melalui Program Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah tingkat efisiensi operasional BKAD di Jawa Timur berdasarkan teknik *Data Envelopment Analysis* (DEA)?; (2) BKAD manakah yang memiliki tingkat efisiensi terbaik (*best practice*) di Jawa Timur?; dan (3) Faktor-faktor apakah yang menjadi determinan tingkat efisiensi BKAD di Jawa Timur?.

Berdasarkan pada permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis tingkat efisiensi operasional BKAD di Jawa Timur; (2) untuk menganalisis BKAD yang memiliki tingkat efisiensi terbaik (*best practice*) di Jawa Timur dan (3) Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi determinan tingkat efisiensi BKAD di Jawa Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis dan praktis khususnya berkaitan dengan program-program pemberdayaan masyarakat yaitu: memberikan masukan-masukan terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja sektor pedesaan, memberikan masukan tentang kebijakan pengembangan usaha ekonomi produktif pedesaan, dan memberikan masukan tentang kebijakan pengembangan BKAD.

Metode analisis menggunakan *Data Envelopment Analysis* yang dimodifikasi sesuai dengan karakteristik BKAD. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan intermediasi yang memarandang sebuah institusi finansial sebagai intermediator yang merubah dan mentransfer aset-aset finansial dari unit-unit surplus menjadi unit-unit defisit. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BKAD di Propinsi Jawa Timur yang berdiri sejak tahun 2005 yaitu sebanyak delapan BKAD di delapan kabupaten di Propinsi Jawa Timur. Teknik penarikan sampel adalah sensus. Data yang dianalisis adalah laporan keuangan BKAD tahun 2006, yaitu tepat 1 tahun beroperasinya BKAD atau pada saat institusi tersebut berada dalam tahap penguatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik Dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada model 1 digunakan konfigurasi variabel output : (a) Pendapatan bunga simpan pinjam, (b) Pendapatan kemitraan, (c) Pendapatan Swakelola dan (4) Pendapatan administrasi pinjaman. Penggunaan konfigurasi output ini dengan mempertimbangkan fungsi BKAD sebagai lembaga keuangan mikro yang bertindak sebagai lembaga intermediasi bagi sektor ekonomi produktif. Sehingga dengan menggunakan konfigurasi output yang demikian maka kinerja operasional dari BKAD dapat dinilai secara tepat.

Dari model pertama terdapat 2 (dua) BKAD yang secara relatif tidak efisien.



Ketidakefisienan tersebut dapat diperbaiki dengan melakukan pengurangan terhadap input yang dipakai atau dengan meningkatkan outputnya. Sementara pada model kedua merupakan bentuk penilaian kinerja terhadap BKAD dalam hal mengukur dampak yang dirasakan masyarakat atas pelaksanaan program. Indikator output yang ditunjukkan dalam model 2 akan mengarah pada aspek jangkauan layanan yang dapat diberikan oleh BKAD kepada masyarakat beserta tolok ukur dampak yang dijadikan alat ukur bagi keberhasilan program. Hasil analisis menunjukkan dari kedelapan BKAD hanya terdapat satu BKAD yang berdasarkan model 2 berada dalam kondisi yang tidak efisien. Berdasarkan hasil analisis dari model 1 dan model 2 terdapat perbedaan dalam hal BKAD yang berada dalam kondisi yang tidak efisien. Hal ini akan memberikan petunjuk bahwa meskipun secara fungsi intermediasi sebuah BKAD telah berjalan secara efisien namun dalam konteks dampak kinerja BKAD terhadap tolok ukur keberhasilan program belum tentu efisien secara relatif.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adalah yang berkaitan dengan kemiskinan. Lapisan masyarakat miskin pada dasarnya merupakan lapisan yang mempunyai potensi ekonomi. Agar mereka terlepas dari problema kemiskinan, maka perlu berdaya ekonomi dipertukarkan sehingga mereka mampu berdaya dalam struktur ekonomi, dengan demikian mampu mengubah nasibnya. Makin tinggi kelas ekonomi yang dimiliki lapisan miskin pada akhirnya diharapkan mereka dapat berdiri dalam mengatasi problem kemiskinan yang mereka hadapi.

Untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan di Jawa Timur secara optimal, pada tahun 2006 ditetapkan kebijakan strategis yang bersifat komprehensif yang terfokus dan memperhatikan tipologi desa, kultur masyarakat serta mendayagunakan sinergi lokal, pusat, dan salah satu program tersebut adalah Program Pengembangan Ekonomi Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang dibentuk dari oleh dan untuk masyarakat lokal.

Dalam perkembangannya BKAD dan UPK mengalami fluktuasi dalam pengelolaan organisasinya sehingga diperlukan upaya-upaya strategis untuk mengetahui kinerja dan menganalisisnya secara ilmiah dengan menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis yang pada akhirnya mampu melihat kinerja BKAD yang paling efisien dan *Best Practice* dan dijadikan *Benchmark* untuk pelaksanaan pendampingan maupun evaluasi-evaluasi program pemberdayaan yang sejenis.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Semoga penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti yang tertarik pada program-program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan serta penciptaan usaha produktif di masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna sebuah karya penelitian yang seharusnya, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaan hasil penelitian ini.

Mulang, Akhir Ramadhan 2008  
Tim Peneliti



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena Ridho dan Barokah-Nya semata maka penelitian fundamental dengan judul *Modifikasi Pendekatan Frontier Data Envelopment Analysis (Dea) Untuk Menilai Efisiensi Badan Kerjasama Antar Desa (Bkad) Dalam Program Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK) Di Jawa Timur* dapat diselesaikan tepat waktu.

Mengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya pemberdayaan orang untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, sosial maupun politik. Pemberdayaan bagi lapisan miskin merupakan sesuatu yang tidak terelakkan kalau pemerataan ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah yang dikehendaki. Lapisan masyarakat miskin pada dasarnya merupakan lapisan yang mempunyai potensi ekonomi. Agar mereka terlepas dari problema kemiskinan ekonomi, maka pemberdayaan ekonomi diperlukan sehingga mereka mampu bersuara dalam struktur ekonomi, dengan demikian mampu mengubah nasibnya. Makin tinggi akses ekonomi yang dimiliki lapisan miskin pada akhirnya diharapkan mereka dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yang mereka hadapi.

Untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan di Jawa Timur secara optimal, pada tahun 2006 ditetapkan kebijakan strategis yang bersifat komprehensif yang terfokus dan memperhatikan tipologi desa, kultur masyarakat serta mendayagunakan teknologi tepat guna, dan salah satu program tersebut adalah Program Pengembangan Ekonomi Kawasan dengan ujung tombak pelaksana di lapang adalah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang dibentuk dari oleh dan untuk masyarakat lokal.

Dalam perkembangannya BKAD dan UPK mengalami fluktuasi dalam pengelolaan organisasinya sehingga diperlukan upaya-upaya strategis untuk mengetahui kinerja dan menganalisisnya secara ilmiah dengan menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis yang pada akhirnya mampu melihat kinerja BKAD yang paling efisien dan *Best Practise* dan dijadikan *Benchmark* untuk pelaksanaan pendampingan maupun evaluasi-evaluasi program pemberdayaan yang sejenis.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam kegiatan ini. Semoga penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti yang tertarik pada program-program pemberdayaan dan pengetasan kemiskinan serta penciptaan usaha produktif di masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan sebuah karya penelitian yang seharusnya, untuk itu kami sangat berharap saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaan hasil penelitian ini.

Malang, Akhir Ramdhan 2008  
Tim Peneliti



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Masalah Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Kajian Pustaka Yang Sudah Dilaksanakan .....	11
1. Landasan Teoritis Inefisiensi .....	11
2. Beberapa Pendekatan Untuk Mengukur In-Efisiensi.....	14
3. Pendefinisian Input Output .....	22
4. Data Envelopment Analysis (DEA) .....	23
5. Penelitian Terdahulu Terhadap Kinerja BKAD .....	42
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	44
A. Tujuan Penelitian .....	44
B. Manfaat Penelitian .....	44
BAB IV METODE PENELITIAN .....	45
A. Pendekatan Penelitian .....	45
B. Variabel Penelitian .....	46
C. Populasi dan Sampel .....	48
D. Metode Pengumpulan data .....	49
E. Metode Analisis .....	49
F. Luaran Penelitian .....	51



BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	53
A.	Deskripsi Obyek Penelitian .....	53
B.	Perkembangan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pada Delapan Kabupaten Di Propinsi Jawa Timur .....	59
C.	Deskripsi Hasil Penelitian .....	62
D.	Pembahasan .....	71
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN .....	76
A.	KESIMPULAN .....	76
B.	SARAN .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....		
Tabel 5.1	Aspek Penilaian Kesehatan BKAD .....	58
Tabel 5.2	Skor dan Kriteria Tingkat Kesehatan BKAD .....	59
Tabel 5.3	Skor dan Kriteria Tingkat Kesehatan BKAD .....	59
Tabel 5.4	Skor dan Kriteria Tingkat Kesehatan BKAD .....	59
Tabel 5.5	Skor dan Kriteria Tingkat Kesehatan BKAD .....	59
Tabel 5.6	Skor dan Kriteria Tingkat Kesehatan BKAD .....	59
Tabel 5.7	Skor dan Kriteria Tingkat Kesehatan BKAD .....	59
Tabel 5.8	Skor dan Kriteria Tingkat Kesehatan BKAD .....	59
Tabel 5.9	Skor dan Kriteria Tingkat Kesehatan BKAD .....	59
Tabel 5.10	Skor dan Kriteria Tingkat Kesehatan BKAD .....	59
Tabel 5.11	Skor dan Kriteria Tingkat Kesehatan BKAD .....	59
Tabel 5.12	Skor dan Kriteria Tingkat Kesehatan BKAD .....	59



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Input Output Menurut Rajesh Chakrabarti & Gauran Chawla ....	32
Tabel 2.2	: Input Output Menurut Daniel Stavarek .....	33
Tabel 4.1	: Variabel Input dan Output Model I .....	47
Tabel 4.2	: Variabel Input dan Output Model 2 .....	47
Tabel 4.3	: Daftar Nama BKAD pada Delapan Kabupaten di Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 .....	48
Tabel 5.1	: Aspek Penilaian Kesehatan BKAD .....	58
Tabel 5.2	: Pengukuran Variabel Kesehatan .....	58
Tabel 5.3	: Skor dan Kriteria Tingkat Kesehatan BKAD .....	59
Tabel 5.4	: Variabel Input BKAD Model I .....	62
Tabel 5.5	: Variabel Output BKAD Model I .....	63
Tabel 5.6	: Efisiensi Relatif BKAD Model I .....	63
Tabel 5.7	: Virtual Input BKAD .....	65
Tabel 5.8	: Virtual Output BKAD .....	66
Tabel 5.8	: Variabel Output BKAD Model 2 .....	68
Tabel 5.9	: Efisiensi Relatif BKAD Model 2 .....	68
Tabel 5.10	: Virtual Input BKAD .....	70
Tabel 5.11	: Virtual Output BKAD .....	71
Tabel 5.12	: Penilaian Tingkat Kesehatan BKAD Pada 8 Kabupaten di Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 .....	72



## DAFTAR GAMBAR

### BAB I

#### PENDAHULUAN

Gambar 5.1 : Chart Efisiensi Relatif BKAD .....	64
Gambar 5.2 : Chart Efisiensi Relatif BKAD .....	69

#### A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional secara normatif bertujuan untuk menciptakan kemakmuran & kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil & merata tanpa kecuali bagi rakyat yang tinggal di pedesaan, yang kurang lebih berjumlah 70% dari seluruh rakyat Indonesia. Dalam skala tertentu ada beberapa indikasi bahwa pembangunan telah berhasil dengan baik, yang dapat dilihat dari indikator ekonomi; antara lain, dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan peningkatan infrastruktur yang lebih baik. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi yang relatif baik ini belum berarti bahwa hasil pembangunan juga dapat dinikmati oleh seluruh atau sebagian besar penduduk.

Pembangunan telah mampu mengurangi jumlah penduduk miskin terutama yang ada di pedesaan baik dari segi absolut maupun relatif. Pengurangan penduduk miskin tersebut perlu untuk dikalkulasi kembali ketika bedai krisis ekonomi yang mengguncang kawasan Indonesia yang dampaknya terasa sampai sekarang ini. Kondisi ini masih dibebani dengan adanya fluktuasi harga bahan bakar dunia berdampak pada sejumlah penyusutan domestik perekonomian negara khususnya pada negara sedang berkembang, termasuk Indonesia yang harus melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional secara normatif bertujuan untuk menciptakan kemakmuran & kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil & merata tanpa terkecuali bagi rakyat yang tinggal di pedesaan, yang kurang lebih berjumlah 70% dari seluruh rakyat Indonesia. Dalam skala tertentu ada beberapa indikasi bahwa pembangunan telah berhasil dengan baik, yang dapat dilihat dari indikator ekonomi, antara lain, dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan peningkatan infrastruktur yang lebih baik. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi yang relatif baik ini belum berarti bahwa hasil pembangunan juga dapat dinikmati oleh seluruh atau sebagian besar penduduk.

Pembangunan telah mampu mengurangi jumlah penduduk miskin terutama yang ada di pedesaan baik dari segi absolut maupun relatif. Pengurangan penduduk miskin tersebut perlu untuk dikalkulasi kembali ketika badai krisis ekonomi yang mengguncang kawasan Indonesia yang dampaknya tersa sampai sekarang ini. Kondisi ini masih dibebani dengan adanya fluktuasi harga bahan bakar dunia berdampak pada sejumlah penyesuaian domestik perekonomian negara khususnya pada negara sedang berkembang, termasuk Indonesia yang harus melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak



peningkatan menjadi 7.455.655 jiwa (19,98%) dari total penduduk dan angka penganggur sebesar 1.051.295 jiwa. Berdasarkan Data Sakernas BPS, 2007 jumlah rumah tangga miskin ini pada Maret 2007 menjadi 7,138 juta jiwa (18,93%) dari total jumlah penduduk atau mengalami penurunan sebesar 318.000 orang dengan jumlah pengangguran sebesar 1,36 juta jiwa.

Setelah Pemerintah menaikkan harga BBM pada bulan Maret dan Oktober 2005 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Berdasarkan data BPS Jawa Timur jumlah keluarga miskin mencapai 3.311.903 Kepala Keluarga (*by name by address*). Jika diasumsikan tiap keluarga miskin terdiri dari 5 (lima) orang maka jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebanyak 16.559.515 jiwa. Hal itu menunjukkan suatu peningkatan angka kemiskinan yang tinggi dan menjadi masalah krusial serta mendesak yang harus ditangani.

Mengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya pemberdayaan orang untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, sosial maupun politik. Pemberdayaan bagi lapisan miskin merupakan sesuatu yang tidak terelakkan kalau pemerataan ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah yang dikehendaki. Lapisan masyarakat miskin pada dasarnya merupakan lapisan yang mempunyai potensi ekonomi. Agar mereka terlepas dari problema kemiskinan ekonomi, maka pemberdayaan ekonomi diperlukan sehingga mereka mampu bersuara dalam struktur ekonomi, dengan demikian mampu mengubah nasibnya. Makin tinggi



peningkatan menjadi 7.455.655 jiwa (19,98%) dari total penduduk dan angka penganggur sebesar 1.051.295 jiwa. Berdasarkan Data Sakernas BPS, 2007 jumlah rumah tangga miskin ini pada Maret 2007 menjadi 7,138 juta jiwa (18,93%) dari total jumlah penduduk atau mengalami penurunan sebesar 318.000 orang dengan jumlah pengangguran sebesar 1,36 juta jiwa.

Setelah Pemerintah menaikkan harga BBM pada bulan Maret dan Oktober 2005 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Berdasarkan data BPS Jawa Timur jumlah keluarga miskin mencapai 3.311.903 Kepala Keluarga (*by name by address*). Jika diasumsikan tiap keluarga miskin terdiri dari 5 (lima) orang maka jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebanyak 16.559.515 jiwa. Hal itu menunjukkan suatu peningkatan angka kemiskinan yang tinggi dan menjadi masalah krusial serta mendesak yang harus ditangani.

Mengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya pemberdayaan orang untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, sosial maupun politik. Pemberdayaan bagi lapisan miskin merupakan sesuatu yang tidak terelakkan kalau pemerataan ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah yang dikehendaki. Lapisan masyarakat miskin pada dasarnya merupakan lapisan yang mempunyai potensi ekonomi. Agar mereka terlepas dari problema kemiskinan ekonomi, maka pemberdayaan ekonomi diperlukan sehingga mereka mampu bersuara dalam struktur ekonomi, dengan demikian mampu mengubah nasibnya. Makin tinggi



masyarakat serta mendayagunakan teknologi tepat guna, dan salah satu program tersebut adalah Program Pengembangan Ekonomi Kawasan.

Program Pengembangan Ekonomi Kawasan merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan dan penanganan pengangguran yang ditekankan pada sektor riil berbasis potensi aktual kawasan. Pengembangan Ekonomi Kawasan menekankan pada upaya pendayagunaan sumber daya ekonomi yang berfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai dengan jasa pelayanan dan upaya-upaya inovasi pengembangannya dalam bentuk: upaya penggalian, sumber daya potensial, pengembangan industri, perdagangan, jasa serta investasi lainnya yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan masyarakat miskin.

Pengembangan ekonomi kawasan adalah sebuah proses yang membentuk kemitraan para pemeran (*stakeholders*) ekonomi atau para *stakeholders*, yaitu pemerintah daerah, kelompok-kelompok berbasis masyarakat dan sektor swasta dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk menciptakan lapangan kerja dan menggiatkan ekonomi daerah. Pendekatan tersebut menekankan pada kewenangan lokal (*local control*), menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya fisik dan kelembagaan. Sehingga, kemitraan pengembangan ekonomi lokal mengintegrasikan upaya mobilisasi para pelaku, organisasi, dan sumber daya serta pengembangan kelembagaan yang baru melalui dialog dan kegiatan-kegiatan strategik. Untuk menunjang kegiatan pengembangan



ekonomi kawasan, sangat diperlukan berbagai strategi yang mendukung ke arah penggalan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah. Salah satu strategi itu adalah pengembangan klaster.

Klaster merupakan kelompok usaha yang berorientasi bisnis dapat berupa sekumpulan orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan baik itu petani, pedagang maupun pengusaha yang menggabungkan diri dalam sebuah wadah untuk melakukan aktivitas usaha yang berbasis bisnis, kumpulan beberapa komponen yang menggabungkan diri dalam sebuah usaha (petani, pedagang, pengusaha), mencakup semua rantai kegiatan ekonomi dari pra-produksi sampai pasca produksi, semua unit usaha dan semua *stakeholder* yang terlibat dengan ditentukan berdasarkan kedekatan geografis, kesatuan sektor usaha, atau kesatuan komoditas, termasuk usaha memproduksi bahan baku, pengolahan, dan para pedagang barang jadinya, termasuk lembaga pelayanan pendukung, dan biasanya mengarah pada komoditas pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain-lain.

Program Pengembangan Ekonomi Kawasan Propinsi Jawa Timur yang dilaksanakan sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2007 telah mampu menjangkau 72 Desa, 28 Kecamatan di 24 Kabupaten. Pelaksanaan program tersebut telah memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas SDM sebesar 3.511 orang, peningkatan Usaha Ekonomi Produktif sebesar 6.249 pelaku usaha, serta tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan Sumberdaya Alam (SDA) sebesar 3.098 orang, sedangkan tenaga kerja yang terlibat dalam



pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar 11.225 orang.

Program Pengembangan Ekonomi Kawasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah meninggalkan jejak berdirinya sebuah institusi usaha yang bergerak dalam bidang / sektor jasa / pelayanan keuangan mikro, kegiatan sektor riil baik dalam bentuk swakelola ataupun kemitraan yaitu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

BKAD dibentuk dengan tujuan mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi wilayah yang berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Pembentukan BKAD difasilitasi oleh sinergi antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Lembaga Pengabdian Masyarakat melalui pilot project di 8 Kabupaten di Propinsi Jawa Timur pada Tahun 2005. Delapan Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bangkalan, Blitar, Lamongan, Malang, Pacitan, Tuban, Trenggalek, dan Tulungagung.

BKAD sejak berdiri sampai saat ini dalam operasionalnya tentu mengalami perubahan baik perkembangan yang bersifat positif maupun negatif yang memiliki kecenderungan surut yang dikarenakan berbagai hal, antara lain komitmen pengurus maupun masyarakat serta tingkat persaingan Lembaga Keuangan di Daerah yang semakin kompetitif ditambah berbagai program pengentasan kemiskinan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah setempat. Sebagai sebuah entitas / unit usaha pelayanan jasa keuangan kepada rumah tangga miskin, perlu dilakukan sebuah upaya



agar BKAD dapat tetap menjalankan visi, misi dan fungsinya sebagaimana yang diharapkan oleh Program Pengembangan Ekonomi Kawasan.

Untuk itu sebagai upaya mengetahui perkembangan BKAD maka perlu dilakukan pengukuran/penilaian kinerja operasional BKAD selama ini, yang dilihat dari faktor-faktor penting yang sangat berpengaruh bagi kelancaran, keberlangsungan dan keberhasilan usaha BKAD, baik untuk jangka pendek maupun untuk keberlangsungan dalam jangka panjang melalui pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA).

## B. MASALAH PENELITIAN

Dengan menggunakan pendekatan parametrik maupun non parametrik *data envelopment analysis* (DEA), maka tujuan dari penelitian mengenai efisiensi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ini adalah untuk memperoleh suatu *frontier* yang akurat. Namun demikian, kedua metode menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mencapai tujuan ini.

Prosedur parametrik untuk melihat hubungan antara biaya diperlukan informasi yang akurat untuk harga *input* dan variabel exogen lainnya. Pengetahuan mengenai bentuk fungsi yang tepat dari *frontier* dan struktur dari *an on-sided error* (jika digunakan), dan ukuran sampel yang cukup dibutuhkan untuk menghasilkan kesimpulan secara statistika (*statistical inferences*). Pendekatan DEA tidak menggunakan informasi, sehingga, sedikit data yang dibutuhkan, lebih sedikit asumsi yang diperlukan dan sample yang lebih sedikit dapat dipergunakan. Namun demikian, kesimpulan secara



statistika tidak dapat diambil jika menggunakan metode non-parametrik.

Perbedaan utama lainnya adalah bahwa pendekatan parametrik memasukkan random error pada *frontier*, sementara pendekatan DEA tidak memasukkan random error. Sebagai konsekuensinya, pendekatan DEA tidak dapat memperhitungkan faktor-faktor seperti perbedaan harga antar daerah, perbedaan peraturan, perilaku baik buruknya data, observasi yang ekstrim, dan lain sebagainya sebagai factor-faktor ketidakefisienan. Dengan demikian, pendekatan nonparametrik dapat digunakan untuk mengukur inefisiensi secara lebih umum. Kelemahan dari pendekatan DEA adalah satu outlier dapat secara signifikan mempengaruhi perhitungan dari efisiensi dari setiap perusahaan.

DEA mempunyai beberapa keuntungan relatif dibandingkan dengan teknik parametrik. Dalam mengukur efisiensi, DEA mengidentifikasi unit yang digunakan sebagai referensi yang dapat membantu untuk mencari penyebab dan jalan keluar dari ketidakefisienan, yang merupakan keuntungan utama dalam aplikasi managerial (Epstein and Henderson, 1989). Selain itu, DEA tidak memerlukan spesifikasi yang lengkap dari bentuk fungsi yang menunjukkan hubungan produksi dan distribusi dari observasi. Selain itu pendekatan parametrik sangat tergantung pada asumsi mengenai data produksi dan distribusi.



Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat efisiensi operasional BKAD di Jawa Timur?
2. BKAD manakah yang memiliki tingkat efisiensi terbaik (*best practice*) di Jawa Timur?
3. Faktor-faktor apakah yang menjadi determinan tingkat efisiensi BKAD di Jawa Timur?